



BULETIN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



TAHUN
2019

Susunan Redaktur

PENASIHAT

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Prov. Kaltim

PENANGGUNG JAWAB

sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Prov. Kaltim

KETUA REDAKSI

kasubbag. Perencanaan Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Prov. Kaltim

SEKRETARIS REDAKSI

Kasubbag. Umum Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Prov. Kaltim

ANGGOTA REDAKSI

Noor Agustina,ST
Ardian,ST
Arif Maulana,S.Sos
Andri Irawan,S.Sos

Daftar Isi

**JAUHAR AKUI KIPRAH DESA
KUTAI BARAT PALING MEWAH /
HAL. 1**

**KEMBALI DIINGATKAN
PRIORITASKAN PENGGUNAAN
DANA DESA UNTUK SEKTOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
/ HAL. 2**

**TIM DPM-PD SAKSIKAN
SERAH TERIMA RMU /
HAL.4**

**JADI CAMBUK, PENGHARGAAN
AKAN TINGKATKAN
PELAYANAN LEBIH RESPONSIF /
HAL. 5**

**PENGHARGAAN BIDANG
DPMPD JUGA DIBAGIKAN DI
ARENA KALTIM AWARD 2019 /
HAL.7**

**KALTIM BOYONG 2
PENGHARGAAN NASIONAL
LOMBA DESA P3MD / HAL. 9**

**PASER JUARA UMUM GELAR
TTG KE 6 PROVINSI KALTIM/
HAL. 10**

**DPMPD KALTIM TUNTASKAN
KERJASAMA SOSIALISASI DAN
MONEV PROKLIM / HAL. 11**

**JAUHAR PAPARKAN ARAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN KALTIM SONGSONG
IKN / HAL. 14**

**RESMI DIBUKA, MEDIA CENTER
DPMPD / HAL. 16**

**KAMPUNG TUKUQ RAIH
PAKARTI II UTAMA TINGKAT
KABUPATEN PELAKSANA
TERBAIK UP2K PKK / HAL. 17**

**PELAMAR REKRUTMEN TPP
DIPERKIRAKAN TERUS
BERTAMBAH / HAL. 18**

**PPU JAWARA LOMBA CERDAS
CERMAT DESA KALTIM / HAL. 19**

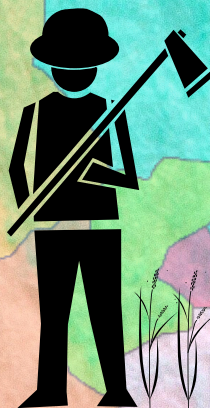
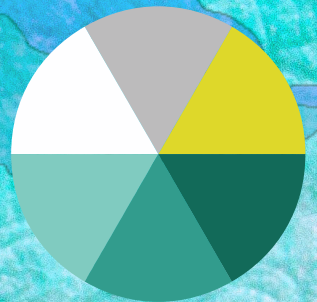
**YUSUF APRESIASI KALTIM
PROVINSI PERTAMA
LAKSANAKAN FGD JAGA DESA,
JAGA KALTIM, JAGA INDONESIA
/ HAL. 20**



TARGET RPJMD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 - 2023

DARI 841 DESA DI KALIMANTAN TIMUR, DPM-PD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENARGETKAN DESA
UNTUK DITINGKANKAN STATUSNYA SEBANYAK

150 DESA DARI
SANGAT
TERTINGGAL ATAU
TERTINGGAL
MENJADI DESA
BERKEMBANG



JAUHAR AKUI KIPRAH DESA KUTAI BARAT PALING MEWAH

KUTAI BARAT -- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui Kegiatan Dialog Interaktif Kiprah Desa 2019, di Kabupaten Kutai Barat paling mewah ketimbang pelaksanaan sebelumnya.

"Tempatnya paling mewah ketimbang pelaksanaan Kiprah Desa tiga tahun terakhir. Empat kali kita melaksanakan Kiprah Desa semuanya hanya dilaksanakan di aula kecamatan atau aula kantor desa. Ini yabg kelima di Lamin Melayu Komplek Taman Budaya Sendawar," ucap Kepala Dinas Pemberdayana Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memberi sambutan pada pembukaan Dialog Interaktif Kiprah Desa 2019, di Sendawar, Kutai Barat, Kamis (2/5)

Jauhar mengaku bersyukur atas sambutan baik Pemkab Kutai Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan Kiprah desa. Dia berharap kegiatan dapat menjangkau informasi keberhasilan kampung, potensi unggulan kampung, serta permasalahan dan solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Melalui Dialog Interaktif Kiprah Desa diharap tercipta koordinasi dan sinkronisasi terkait tugas penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.

"TENTUNYA KITA SEMUA BERHARAP PENGAWALAN DANA DESA BISA MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA/KAMPUNG DI KALTIM"

"Pendek kata kita akan serap informasi agar penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kutai Barat lebih baik lagi," katanya.

Hal tersebut dibuktikan tercapainya target RPJMD Kaltim 2019-2023 mengurangi jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim, khususnya di wilayah Kutai Barat. Jika provinsi menetapkan mengurangi 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal selama lima tahun,

Kutai Barat diharap lebih banyak lagi. Sebab kondisinya kampung di Kutai Barat rata-rata masih berstatus tertinggal.

Dialog Kiprah Desa 2019 sendiri merupakan pelaksanaan kelima sejak 2017. Pelaksanaan kegiatan yang diikuti Camat se Kutai Barat dan Kepala Kampung se Kecamatan Barong Tongkok tersebut dibuka oleh Bupati Kutai Barat, FX Yapan dengan dihadiri narasumber dari Polda Kaltim, DPMPD Kaltim, Inspektorat Kaltim, BPKAD Kaltim, serta OPD dan FORKOPINDA Kabupaten Kutai Barat.

KEMBALI DIINGATKAN, PRIORITASKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SEKTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



KUKAR -- Berkumpulnya kepala desa beserta perangkat, BPD, dan organisasi perempuan se Kabupaten Kutai Kartanegara kembali dimanfaatkan mengingatkan agar penggunaan Dana Desa (DD) lebih diarahkan untuk sektor pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan evaluasi penggunaan dana desa sejak 2015 hingga 2019 lebih banyak digunakan untuk sektor pembangunan desa. Persentasenya mencapai 90 persen lebih, sementara untuk pemberdayaan masyarakat masih terbilang kecil.

Padahal sektor pemberdayaan masyarakatlah yang dinilai dapat mendorong kemajuan desa karena mampu mendorong masyarakatnya semakin berdaya saing.

"Sebagai contoh Desa Pela. Potensinya sebagai desa wisata memungkinkan penggunaan DD untuk kegiatan pengembangan wisata maupun peningkatan kapasitas masyarakat agar sadar wisata," kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi yang membuka Dialog Interaktif Kiprah Desa, di Gedung Serbaguna Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (11/9).

Sebagai contoh, DD bisa dimanfaatkan menggelar pelatihan Bahasa Inggris bagi masyarakat agar bisa berkomunikasi jika suatu saat ada wisatawan asing berkunjung

Mengingat Desa Pela potensial dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kecamatan, dan daerahnya menjanjikan suasana tenang jika wisatawan mencari ketenangan.

Dia menyarankan agar potensi Desa Pela terus dikembangkan, diantaranya diharap membuat paket wisata yang menarik kemudian didukung kondisi masyarakat sekitar yang sadar wisata. Sebagai contoh harus ramah terhadap pengunjung dan mampu menjaga keamanan di wilayahnya.

Sebab Bali bisa berkembang menjadi daerah wisata seperti sekarang karena daerahnya relatif aman dan hampir tidak ada kasus pencurian. Sekalipun terjadi itu karena pendatang.



...aksanaan Kiprah merupakan upaya untuk menjaring berbagai informasi terkait pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa di seluruh wilayah Kaltim.

...ermasuk menyampaikan informasi secara jelas terkait undang-undang dan peraturan terkait pelaksanaannya.

Seperti diketahui sejak terbit UU No6/2014 tentang desa tidak sedikit peraturan perundang-undang turunannya diterbitkan. Termasuk peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun terus berubah..

Sementara Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono menyebutkan Kiprah Desa bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2019 dilaksanakan dengan maksud dapat menggali informasi langsung dari masyarakat tentang keberhasilan pembangunan desa, pengembangan inovasi dan potensi unggulan desa, serta untuk menilai perkembangan perkembangan pelaksanaan program kegiatan yang sudah dan atau sedang berjalan.

"Diharapkan dapat terjadi sinergitas provinsi dan kabupaten kota terkait pembangunan desa dengan mendengarkan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi serta percepatan pencapaian program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyamaan dan pemahaman dan persepsi," katanya.

Kegiatan dimaksudkan untuk menginventarisasi pokok-pokok permasalahan pokok masyarakat dan pemerintahan desa serta langkah pemecahannya, serta melaksanakan fungsi Satgas Pengawasan DD dan Pembinaan Implementasi UU Desa.



Kegiatan menghadirkan narasumber Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekkab Kutai Kartanegara, Ahmad Taufik Hidayat, Kapolda Kaltim yang Diwakili AKP Sakir Arman, Kasitel Kejari Kutai Kartanegara, Teguh Dwi Cahyo, dan Kabid APD BPKP Kaltim, Sumaljo, serta Irban PA Inspektorat Kaltim, Ghazali, serta kepala bidang lingkup DPMPD Kaltim, Riani Tisnadewi, Rusniati, dan Isnaini Trikorawati beserta beberapa staf teknis dengan moderator Marga Rahayu dari RRI Samarinda.(DPMPD Kaltim/arf)

"MELALUI KEGIATAN INI DIHARAP SETIAP PESERTA YANG HADIR DAPAT BERTANYA SECARA JELAS MENGENAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA AGAR MAMPU MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DENGAN BAIK"

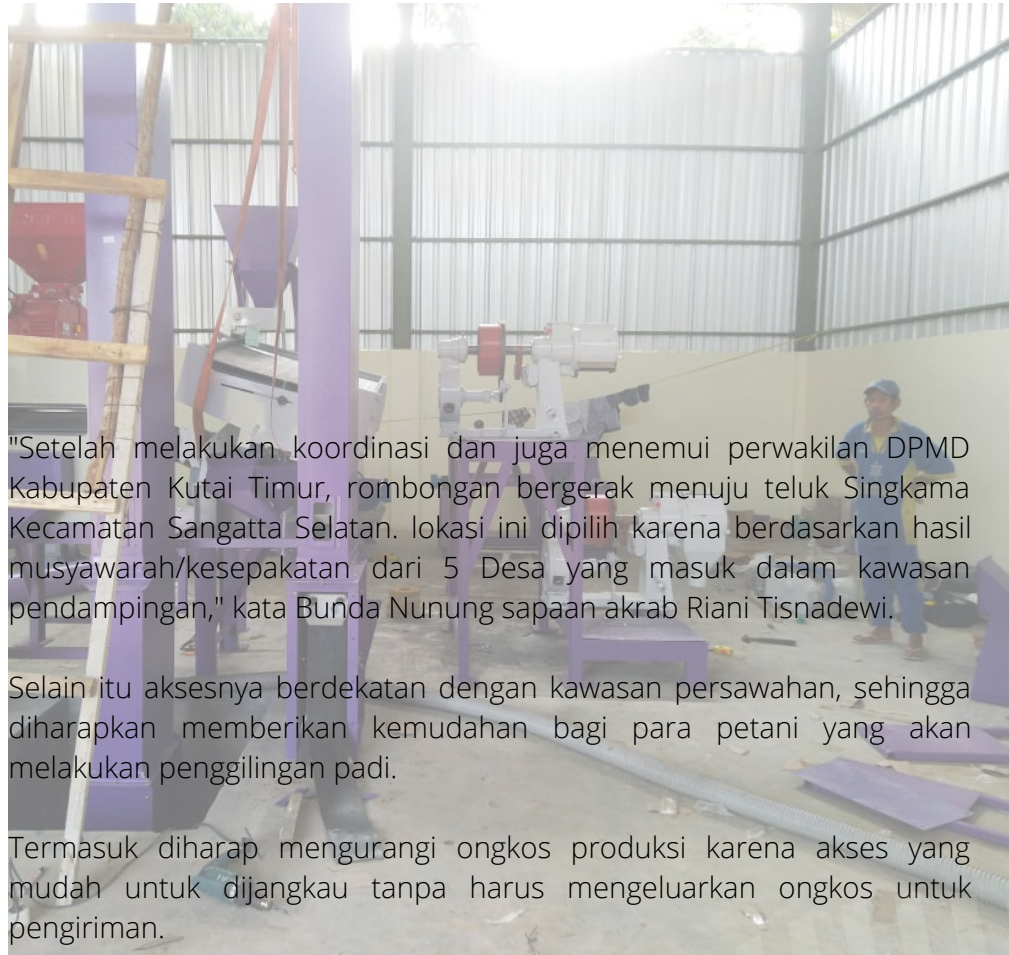


TIM DPM-PD SAKSIKAN SERAH TERIMA RMU

SANGATTA . tlim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memanfaatkan momentum agenda monitoring salah satu kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Timur, sekaligus ikut menyaksikan proses serah terima Rice Milling Unit (RMU) bantuan Ditjen PKP Direktorat Sumber Daya Alam (SDA) ke wilayah tersebut.

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi didampingi Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Esthi Susila Rini dan Kasi Pengolahan Informasi Desa dan Kelurahan, Isnawati menerima Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III, di Ruang Kepala DPMD Kabupaten Kutai Timur, Rabu (16/10).

Pertemuan dalam rangka melakukan serah terima mesin penggiling padi yang merupakan hibah dari Kementerian Desa ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (BumDesMa) Sejahtera Bersama Kabupaten Kutai Timur.



"Setelah melakukan koordinasi dan juga menemui perwakilan DPMD Kabupaten Kutai Timur, rombongan bergerak menuju teluk Singkama Kecamatan Sangatta Selatan. lokasi ini dipilih karena berdasarkan hasil musyawarah/kesepakatan dari 5 Desa yang masuk dalam kawasan pendampingan," kata Bunda Nunung sapaan akrab Riani Tisnadewi.

Selain itu aksesnya berdekatan dengan kawasan persawahan, sehingga diharapkan memberikan kemudahan bagi para petani yang akan melakukan penggilingan padi.

Termasuk diharap mengurangi ongkos produksi karena akses yang mudah untuk dijangkau tanpa harus mengeluarkan ongkos untuk pengiriman.

Sementara Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III, Purwadi Sukarelawanto menitip pesan kepada Direktur Bumdesma Sejahtera Bersama untuk terus inovatif dan kreatif menjalankan Badan Usaha Milik Desa Bersama ini.

Dia berharap fasilitas yang sudah diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kutai Timur dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di 5 Desa yang termasuk dalam pendampingan Kawasan Perdesaan Kutai Timur.

Untuk diingat, bantuan disalurkan ke Desa Teluk Singkama Kabupaten Kutai Timur dengan dana sebesar Rp750 juta untuk pembangunan gudang produksi dan juga pengadaan alat produksi penggilingan padi. Semua bantuan tersebut dikirim langsung dari pusat. Sementara daerah hanya menyiapkan lokasi berupa tanah yang dihibahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa dan diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BumDesMa) sebagai pengelola dari rumah produksi beras tersebut.



JADI CAMBUK, PENGHARGAAN HARUS TINGKATKAN PELAYANAN LEBIH RESPONSIF

SAMARINDA – Kepala Desa/Kampung dan Lurah berprestasi diingatkan terus melakukan perubahan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penghargaan hendaknya menjadi cambuk untuk terus meningkatkan pelayanan yang lebih responsif.

“Semua harus terus melakukan perubahan. Sudah saatnya pemerintahan desa/kelurahan lebih responsif memberikan pelayanan. Lebih cepat menyerap aspirasi masyarakat dan mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan akurat. Ditandai ada kepastian pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu berapa lama,” urai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi.

Jauhar dalam arahannya saat memimpin Apel Pagi dan Penyerahan Penghargaan Uang Pembinaan Lomba Desa dan Kelurahan 2018, di Halaman Kantor DPMPD Kaltim, Senin (19/1) menambahkan sekarang sudah saatnya kepala desa/lurah berdiskusi bersama melibatkan pelaku usaha dan masyarakat terkait upaya yang akan dilakukan merubah wajah desa.

Ia menilai sekarang ada tren orang kota ingin berlibur ke desa. Karenanya desa harus mampu menangkap peluang. “Sekarang sudah saatnya diskusikan dengan baik ketika ada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang bisa ditangkap,” katanya.



Menurutnya Kaltim punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ketika melihat Desa di Magelang misalnya, selama tiga tahun terakhir ada 80 objek wisata baru dikembangkan.

Jumlah tersebut tidak sedikit, karenanya desa di Kaltim juga dituntut kreatif dan inovatif melihat potensi yang ada untuk membangun desa.

“Semua ditantang harus kreatif. Apalagi prioritas penggunaan Dana Desa 2019 diamankan harus dimanfaatkan untuk pengembangan kualitas SDM dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur sudah bergeser. Artinya Dana Desa harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” sebutnya.

Hal penting lain yang menjadi arahnya. Jauhar mengingatkan pentingnya mempercepat proses penyaluran Dana Desa di Kaltim. Sebab sesuai ketentuan penyaluran Dana Desa paling lambat diajukan per 14 Desember Pukul 17.00 Wita melalui aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN).

Jika pada saatnya belum diterima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) maka Dana Desa tersebut tidak disalurkan dan akan masuk Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

“Mari semua segera bergerak karena 14 Desember hanya tinggal 25 kali sarapan pagi. Belum dipotong libur. Artinya efektif hanya tinggal 18 kali sarapan pagi. Jangan sampai tidak tersalurkan sementara desanya sudah membuat rancangan,” tegasnya.



Lainnya yang perlu menjadi perhatian selama ini profil desa dan kelurahan belum sepenuhnya dapat diakses secara online. Karenanya perlu dibenahi agar memudahkan masyarakat melihat potensi desa dan meningkatkan kualitas penilaian saat lomba desa dan kelurahan.

“Untuk profil desa nilainya 30 persen disamping penilaian sektor pendidikan, kesehatan, kewilayahan, dan tatakelola pemerintrah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” terangnya.

Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Kaltim tahun 2018 sendiri dianugrahi penghargaan uang pembinaan. Uang pembinaan sebesar Rp7juta, Rp5juta, dan Rp3juta untuk terbaik satu hingga tiga Lomba Desa dan Kelurahan tersebut diserahkan Kepala DPMPD Kaltim kepada kepala desa dan lurah salam sausana Apel Pagi, di Lingkungan DPMPD Kaltim.

Tidak sebatas itu. Mereka akan dianugrahi tropi penghargaan yang akan diserahkan Gubernur Kaltim, Isran Noor pada Malam Anugrah Kaltim Award 2019 dalam rangka HUT Pemprov Kaltim ke 62, 9 Januari 2019.

Juara satu sampai tiga Lomba Desa 2018 masing-masing diraih Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan nilai 831 dan disusul Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Sedangkan juara satu sampai tiga Lomba Kelurahan 2018 diraih Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.(DPMPD Kaltim/arf)



PENGHARGAAN BIDANG DPMPD JUGA DIBAGIKAN DI ARENA MALAM KALTIM AWARD 2019

SAMARINDA -- Sebanyak 15 piagam penghargaan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) juga dibagikan di arena Malam Kaltim Award 2019, di Planery Hall Convention Hall Samarinda, Rabu (9/1).

Penghargaan diserahkan Asisten II Sekprov Kaltim, Ichwansyah berbarengan penyerahan berbagai penghargaan bidang lain yang dianugerahkan dalam rangka peringatan HUT Pemprov Kaltim ke 62 tahun 2019 yang masing-masing diserahkan Asisten III, Asisten I, Pj Sekprov Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim, dan Gubernur Kaltim secara bergantian

Adapun penghargaan bidang DPMPD yang diserahkan mulai dari lomba posyandu kategori kota tingkat Provinsi Kaltim diraih Posyandu Kemala, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara juara I, Posyandu Bina Mitra Sejahtera, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan juara II, Posyandu Menur 043, Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda kota Juara III.

Lomba Posyandu kategori Kabupaten tingkat Provinsi Kaltim diraih Posyandu Kasih Bunda, Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Juara I, Posyandu Melati Makmur, Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah Juara II, dan Posyandu Sukma, Desa Sukamaju, Kecamatan Kombeng Juara III.



PENGHARGAAN BIDANG DPMPD JUGA DIBAGIKAN DI ARENA MALAM KALTIM AWARD 2019(1)

Lomba Bulan Bakti Gotong Royong kategori Desa tingkat Provinsi Kaltim diraih Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur Juara I dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Samboja Juara II. Lomba Bulan Bakti Gotong Royong kategori Kelurahan tingkat Provinsi Kaltim diraih Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa.

Selanjutnya Perlombaan Desa/Kampung tingkat Provinsi Kaltim diraih Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur Juara I, Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam Juara II, dan Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok Juara III. Terakhir Perlombaan Kelurahan tingkat Provinsi Kaltim diraih Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat Juara I, Kelurahan Sepingga, Kecamatan Balikpapan Selatan Juara II, Kelurahan Tanjung Redep, Kecamatan Tanjung Redeb Juara III.

Sedangkan Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemdes yang diraih Kabupaten Berau lebih dulu diserahkan Gubernur Isran kepada Wakil Bupati Berau, Agus Tamtomo pada apel peringatan HUT Pemprov Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran Noor dalam arahannya menyebutkan, penghargaan yang diberikan merupakan bentuk pengakuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada sektor masing-masing.

"Secara kasat mata penghargaan tidak ada harganya, karena hanya secarik kertas. Tapi itu membanggakan.

Disitu masyarakat diwongke (dimanusiakan, diapresiasi, diakui,Red)," ujarnya.

Namun demikian ia berharap kabupaten/kota tidak sekadar mengejar prestasi. Laksanakan saja pembangunan dengan baik, maka dipastikan penghargaan akan mengikuti.

Disisi lain, ia menyebut Kaltim di usia ke 62 telah berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Bahkan Kaltim pernah menjadi daerah penyumbang devisa negara dari pengolahan migas dan batubara.

Inisiasi pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda dan Bandara Internasional APT Pranoto mendapat perhatian. "Sejak Mei 2018 tol diambil alih pusat dan kedepan perluasan terminal dan perpanjang runway, maupun pembangunan apron dibawah tanggung jawab Kemenhub. Artinya manfaat dan hikmah pengorbanan masyarakat membangun membangun infrastruktur," tukasnya.(DPMPD Kaltim/arf)

"KALTIM MEMANG MAJU BERKEMBANG, TAPI KONDISINYA MASIH BELUM SEIMBANG DENGAN YANG DIBERI. BUKTINYA INFRASTRUKTUR MASIH TERTINGGAL MASYARAKAT MISKIN MASIH CUKUP BANYAK" GUBERNUR ISRAN NOOR

Karenanya momentum peringatan HUT Pemprov Kaltim ke 62 ini, ia mengakui jasa Gubernur Kaltim sebelumnya, Awang Faroek Ishak yang punya semangat kuat membangun infrastruktur Kaltim yang rela merogoh kocek cukup dalam dari APBD Kaltim untuk menarik perhatian pusat.

KALTIM BOYONG DUA PENGHARGAAN NASIONAL LOMBA DESA P3MD

JAKARTA – Desa-desanya Kaltim kembali berhasil menorehkan prestasi di kancah nasional. Desa Bhuana Jaya dan Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili Kaltim memboyong dua penghargaan nasional Lomba Desa versi Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Desa Bhuana Jaya dianugerahi penghargaan terbaik ketiga kategori D Informasi dan Transparansi Publik. Sedangkan Desa Loa Duri Ilir menjadi terbaik Indeks Desa Membangun (IDM).

Penghargaan Lomba Desa dan Pendamping Terbaik tersebut diserahkan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo kepada kepala desa dan pendamping pada penganugerahan desa dan pendamping desa terbaik nasional 2018, di Jakarta, Kamis (29/11).

Menteri Eko dalam arahannya menyebut lomba desa dan pendamping tersebut dilakukan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan P3MD yang lahir seiring terbitnya UU No6/2014 tentang desa. P3MD merupakan upaya percepatan pembangunan desa dalam rangka pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa/kampung dan pendamping diberikan penghargaan karena berdasarkan penilaian punya komitmen dan kinerja baik dalam pelaksanaan P3MD di daerah. Ditandai terealisasinya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dan ditelapkan bersama melalui musyawarah desa.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi ketika dikonfirmasi terpisah mengaku bersyukur atas penghargaan tersebut. Keberhasilan tersebut menunjukkan mereka sungguh-sungguh membangun desa. "Makanya harus diapresiasi," ujarnya.

Menurutnya, Kaltim sebenarnya mengutus empat perwakilannya ikut lomba nasional tersebut. Mereka yang berdasarkan penilaian tingkat provinsi menjadi terbaik.

Kepala Kampung Maluang, Kabupaten Berau, Muchtar, Kepala Desa Kertabakti, Kabupaten Paser, Tusino, Kepala Desa Bhuana Jaya, Kutai Kartanegara, Suwondo, dan Kepala Desa Loa Duri Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Fakhri.

Hanya saja Kaltim cukup puas hanya berhasil menggondol dua penghargaan, karena proses penilaiannya, aku Jauhar, cukup ketat. Tim melihat hasil evaluasi yang sudah dilakukan dan kemudian melakukan tahapan wawancara mendalam untuk mengukur kesesuaian hasil evaluasi dengan pemaparan, sehingga dianggap layak menjadi juara.

Disisi lain, ia menyebut lomba desa P3MD berbeda dengan lomba desa dan kelurahan yang biasa dilaksanakan Kemendagri. Jika versi Kemendagri bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa dan kelurahan secara keseluruhan, lomba desa versi Kemendes PDTT hanya mengevaluasi kinerja pelaksanaan P3MD.

Intinya, lomba-lomba dimaksud sama-sama bertujuan meningkatkan kinerja desa dalam melaksanakan P3MD di wilayahnya dan mendorong setiap tenaga pendamping profesional memberikan pengabdian terbaik mendampingi desa dalam melaksanakan P3MD. (DPMPD Kaltim/Elvis/arf)

PASER JUARA UMUM GELAR TTG KE 6 TINGKAT PROVINSI KALTIM

SANGATTA -- Pameran teknologi terapan masyarakat pada ajang Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke enam tingkat Provinsi Kaltim dijuarai perwakilan Kabupaten Paser.

Penggiat TTG Paser, Agus Salim dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Taka Berkerai, Kecamatan Long Ikis, Paser, Jaelani masing-masing menjadi terbaik pertama penilaian kategori TTG Unggulan dan Kategori Posyantek tingkat Provinsi Kaltim tahun 2019.

Selanjutnya, juara kedua dan ketiga kategori TTG Unggulan diraih Penggiat TTG Balikpapan, Agus dan Penggiat TTG Samarinda, Toto. Selanjutnya juara kedua dan ketiga kategori Posyantek diraih Posyantek Kumala, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar, Latif dan Posyantek Riyoto, Kutai Timur, Ahmad Suyoto.

Penetapan pemenang dilakukan melalui rapat tim juri dan ditetapkan dalam berita acara penetapan pemenang Gelar TTG dan Posyantek tingkat Provinsi Kaltim 2019, tertanggal 27 Juni 2019.

Penghargaan pemenang Gelar TTG dan Posyantek diserahkan pada acara puncak Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke 47, Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM), dan Gelar TTG Tingkat Provinsi Kaltim 2019 oleh Bupati Kutim, Ismunandar, di Graha Expo Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (27/6).

Dikatakan Ketua Tim Penilai Gelar TTG Tingkat Provinsi Kaltim, Endang Efendi rapat penetapan pemenang berlangsung alot. Sebab semua peserta menunjukkan kualitas produk alat TTG yang dihasilkan.

"Makanya ini yang ditetapkan juara ya merupakan hasil akhir kesepakatan seluruh tim penilai. Akumulasi penilaian semua aspek yang ditetapkan," ujarnya.

Tim penilai sendiri terdiri dari jajaran DPMPD Kaltim, yakni Esthi Susila Rini, Muriyanto, Helvin Syahrudin, dan Noor Agustina. (DPMPD Kaltim/arf)



KEBERADAAN APLIKASI MARKETPLACE MENDESAK MENDORONG BUMDES SONGSONG IKN

SAMARINDA – Keberadanaan Aplikasi Marketplace disebut sangat mendesak untuk segera dirampungkan dalam rangka mendorong kemajuan BUMDes menyongsong ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

"BUMDes harus bersiap mengambil peluang ditetapkannya Kaltim sebagai IKN. Salah satunya BUMDes harus menggandeng Marketplace agar bisa mengembangkan potensinya, sehingga bisa meningkatkan perekonomian serta harkat martabat desa," ujar Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMPD Kaltim melalui Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Muriyanto, Kamis (24/10).

Karenanya dia bermimpi kedepan akan membuat Aplikasi Marketplace BUMDes khusus mengakomodir BUMDes yang ada di Kaltim. Aplikasi tersebut nantinya akan menjadi media promosi dan sinergi usaha BUMDes dalam mengembangkan usahanya.

Terlebih pemerintah saat ini mendorong desa mengembangkan potensi ekonomi daerah setempat melalui BUMDes. Agar memiliki daya saing di tengah perkembangan dunia digital, BUMDes harus bisa menggandeng marketplace untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada konsumen dan nilai bisnisnya.

"Semoga niatan ini bisa terealisasi. Didukung ketersediaan anggaran memadai mendorong peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan BUMDes yang saat ini menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam pelaksanaan RPJMD 2019-2023," harapnya.(DPMPD Kaltim/muri/arf)



DPMPD KALTIM TUNTASKAN KERJASAMA SOSIALIASI DAN MONEV PROKLIM

SAMARINDA – Program kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dengan Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi telah dituntaskan.

DPMPD secara paralel melaksanakan dua kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) ini, yakni sosialisasi dan monev proklam di awal September dan berakhir Oktober 2019.

“Yang menjadi tugas kita dua kegiatan ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai harapan dan target yang ditetapkan. Hal tersebut sesuai ketentuan kerjasama dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengamanatkan pelaksanaan kerjasama mulai Agustus - 31 Oktober 2019,” aku Kepala DPMPD Kaltim melalui Penanggung Jawab Kegiatan, Noor Fathoni, di Samarinda, Rabu (6/11).

Menurutnya, sosialisasi dibagi dua regional, yakni regional satu untuk wilayah PPU, Paser, dan Berau, serta regional dua untuk wilayah Kutim, Kukar, Kubar, dan Mahulu. Sosialisasi menyasar 150 desa lokasi Proklam yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai peserta.

Kemudian dilanjutkan secara serentak melaksanakan monev untuk melihat langsung desa lokasi proklam. Mengukur tingkat pemahaman dan komitmen kepala desa, tokoh adat, maupun masyarakat desa terkait pelaksanaan proklam di desanya.

Harapannya saat tim lain turun lapangan untuk Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), para pihak terkait sudah faham dan siap terlibat melaksanakan Proklam.

Terkait hasil monev, secara umum desa/kampung yang dikunjungi menyatakan komitmennya mendukung siap mendukung proklam.

Diantaranya, Kampung Jambuk dan Kampung Muara Siram, Kecamatan Bongan serta Kampung Lakan Bilem dan Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat. Keempat desa sasaran wilayah Kutai Barat ini mengaku siap menjadi lokasi proklam karena bersyukur daerahnya ditetapkan 150 desa lokasi pelaksanaan dari 841 desa se Kaltim.

Masyarakat Kampung Jambuk misalnya, sangat antusias yang akan menjadikan kawasan berhutan milik desa seluas 1.000 hektar pemberian PT ITCI dari total luas kawasan hutannya 10.000 hektar.

Sedangkan tiga kampung lainnya di Kutai Barat sekalipun berkomitmen masih terkendala legalitas lahan dan keterbatasan anggaran dari APBDes untuk pelaksanaan kegiatan turunannya.

Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono mengapresiasi gerak cepat jajaran DPMPD yang terlibat terlibat sukses kegiatan kerjasama tersebut. Menurutnya ini bagian komitmen DPMPD mendukung program kerjasama Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan negara donor yang didanai Bank Dunia.

Hanya saja jika dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis DPMPD Kaltim 2019-2023 target sasaran proklam sedikit berbeda, baik desa sasaran maupun keluarannya.

Menurutnya, terdapat perbedaan sasaran 150 desa proklam versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas Lingkungan Hidup dengan yang ditetapkan DPMPD.

DPMPD KALTIM TUNTASKAN KERJASAMA SOSIALIASI DAN MONEV PROKLIM(1)

Alasannya karena DPMPD menetapkan target tidak sekadar melihat tutupan hutannya, tapi melihat status Indeks Desa Membangun (IDM) nya yang masih sangat tertinggal dan tertinggal untuk ditingkatkan menjadi berkembang

“Dari jumlah desa tersebut hanya 28 desa yang sama persis. Selebihnya beda. Hal ini wajar terjadi karena memang basis penentuan lokasinya yang berbeda. DPMPD basisnya IDM, maka KLHK basisnya tutupan hutan. Namun secara umum Pemprov Kaltim selain mewujudkan proklam versi IDM juga mendukung proklam versi KLHK dan DLH,” sebutnya.

Untuk diketahui, Proklam merupakan program pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund yang mulai dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim dengan total kawasan berhutan sebesar (12,7 juta hektare). Dari jumlah kawasan hutan tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program kampung iklim akan mempertahankan 6,5 juta hektare kawasan berhutan di 150 Desa/Kampung

Komitmen RI yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Pemerintah Indonesia menargetkan menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Referensi Emisi di Kalimantan Timur dari Tahun 2020-2024 sebesar 342 juta tCO₂e (Karbon), di mana 73 persen dari kegiatan Deforestasi, 21 persen dari Degradasi hutan, 2 persen dari kehilangan mangrove, 2 persen dari Dekomposisi gambut dan 3 persen dari Kebakaran hutan.

Sementara Target Tingkat referensi Emisi Tahunan Kalimantan Timur sebesar 68,4 juta tCO₂e. (Kondisi saat ini). Melalui Program Kampung Iklim ini diharapkan mampu menurunkan emisi sebesar 86,3 juta tCO₂e, atau menurunkan sebesar 25 persen dari referensi emisi. Penurunan emisi setelah dikurangi penyangga sebesar 61,3 juta tCO₂e.(DPMPD Kaltim/arf)



JAUHAR PAPARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN KALTIM SONGSONG PEMINDAHAN IKN

SAMARINDA – Momentum berkumpulnya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dimanfaatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengingatkan agar arah kebijakan pembangunan desa sekaligus menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim.

Diantaranya program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan indikator lembaga kemasyarakatan desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa, serta program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan indikator jumlah BUMDes yang aktif.

Adapun program dimaksud mulai dari program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berupa proporsi yang berperan aktif dalam membangun desa, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat berupa jumlah regulasi daerah + mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat.



Karenanya saat memberi pemaparan pada Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) kaltim, dia menyampaikan pentingnya arah kebijakan pembangunan perdesaan diseleraskan dengan RPJMD Kaltim 2019-2023 menyongsong pemindahan IKN.

Secara rinci, Jauhar menyebutkan program RPJMD yang bisa menjadi acuan desa dalam menetapkan rencana pelaksanaan P3MD di wilayahnya masing-masing.

Kemudian program peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) berupa jumlah usaha masyarakat desa pemanfaat TTG yang memiliki nilai daya saing pasar, program pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosbudmasy melalui kelompok usaha ekonomi keluarga yang aktif.

JAUHAR PAPARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN KALTIM SONGSONG PEMINDAHAN IKN (1)

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat melalui presentasi penduduk miskin perdesaan yang memiliki usaha ekonomi produktif, program pembinaan penyelenggaraan pemdeskel melalui pelayanan pemdes yang memenuhi standar pelayanan minimal, dan program pembangunandesan dan kawasan perdesaan melalui jumlah desa yang berkembang

Pada kesempatan dia juga mengingatkan pentingnya inovasi desa dalam pelaksanaan P3MD. Program Inovasi Desa dimaksudkannya karena pemerintah menginginkan agar dana desa lebih berkualitas. Caranya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(DPMPD Kaltim/arf)



RESMI DIBUKA, MEDIA CENTER DPMPD

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim resmi memiliki layanan informasi Media Center.

Pusat layanan informasi kegiatan lingkup DPMPD Kaltim dan promosi produk usaha BUMDes Kaltim tersebut diresmikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dengan penandatanganan prasasti, di Ruang Tunggu Kantor DPMPD Kaltim, Jumat (26/4).

Dalam arahnya, Wagub mengingatkan agar media center dapat dimanfaatkan secara optimal memberi pelayanan publik. Peresmian media center menjadi pertanda hasil kerja keras yang sudah dilakukan DPMPD Kaltim.

"Banyak hal simbolis dalam sekian pekerjaan yang kita lakukan. Ini salah satunya hanya sekedar simbolis. Terpenting bagaimana sebagai pelayan masyarakat harus mampu memberikan pelayanan cepat tepat dan efisien. Terpenting bisa ciptakan masyarakat aman, damai, dan sejahtera" ujarnya.

Sebagai instansi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dia menyebut banyak aktifitas yang bisa dilaksanakan langsung bersentuhan dengan masyarakat desa.

Berharap yang bertugas ke desa belajarlah jadi orang yang mencintai pekerjaan dengan baik. Dimanapun diberi amanah pekerjaan harus bekerja dengan cinta agar pekerjaan dilakukan dengan optimal.

Sementara Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengaku bersyukur atas kesediaan Wagub Kaltim menjadi khotib yang sekaligus meresmikan media center dan memimpin rapat pejabat struktural DPMPD Kaltim.

Dia berharap kunjungan wagub tersebut menjadi penyemangat meningkatkan kinerja DPMPD Kaltim kedepan. Khususnya dalam mewujudkan target RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni menurunkan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim.

"Selama lima tahun kedepan kita menetapkan target mengurangi 150 desa dari 518 desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal. Semoga program yang kita rencanakan terlaksana dengan baik, sehingga menjadi faktor pengungkit menurunkan jumlah dengan status tertinggal," katanya.

Terkait media center sendiri, Jauhar berharap membantu masyarakat memenuhi kebutuhan informasi terkait bidang DPMPD Kaltim. Termasuk menjadi media promosi produk unggulan usaha ekonomi masyarakat yang tergabung dalam BUMDes se Kaltim.

"Silahkan manfaatkan media center yang kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik sesuai amanat UU No14/2018 tentang keterbukaan informasi publik dan sebagai media pembinaan BUMDes Kaltim.(DPMPD Kaltim/arf)

"KALAU TIDAK BEKERJA DENGAN CINTA, PASTI BANYAK MENGELUH, DAN MARAH SEHINGGA MENJADIKAN TIDAK BERKAH," BAPAK HADI MULYADI



KAMPUNG TUKUQ RAIH PAKARTI II UTAMA TINGKAT KABUPATEN PELAKSANA TERBAIK UP2K PKK

PADANG -- Provinsi Kaltim kembali menoreh prestasi dikancah nasional. Kampung Tukuq, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat dianugerahkan penghargaan Pakarti Utama II Tingkat Kabupaten sebagai Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK diarena Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 Tingkat Nasional Tahun 2019 yang digelar di Lapangan RTH Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Rabu (24/7).

"Syukur alhamdulillah, sangat membanggakan dan membahagiakan. Itulah hasil kerja keras. Warga pedalaman Kutai Barat di Kampung Tukuq membuktikan bahwa daerah pedalaman ternyata juga mampu bersaing di level nasional. Terima kasih untuk semuanya," kata Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor didampingi Wakil Ketua I TP PKK Kaltim, Erni Makmur Hadi Mulyadi dan Kepala DPMPD Kaltim Moh Jauhar Efendi usai penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua Umum TP PKK Pusat Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.

Keberhasilan tersebut diakui membuat Kaltim bangga. Apalagi Kampung Tukuq secara geografis berada jauh di pedalaman. Mereka membuktikan dari ujung pedalaman, Kampung yang berbatasan dengan Kampung Tambaba, Kecamatan Barito Utara, Kalimantan Tengah ini sukses mengharumkan nama Kaltim di kancah nasional.

Keberhasilan tersebut karena kampung ini dinilai sangat sukses mengembangkan program UP2K. Salah satunya kerajinan anyaman rotan menjadi berbagai produk olahan berkualitas dan bernilai tambah, seperti tikar, tas motif, sepatu, topi, dan lain sebagainya.

Hampir semua keluarga di kampung tersebut menekuni usaha kerajinan rotan tersebut. Dan sebagian produk warga Kampung Tukuq sudah laku terjual di arena Pameran HKG di Kota Padang, bahkan sebelum pameran itu dibuka oleh Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Rabu sore kemarin.

Usaha kerajinan anyaman rotan ini pun memberikan dampak sangat baik terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di kampung setempat. Meski menghadapi banyak hambatan seperti infrastruktur jalan yang sebagian rusak dan berlubang semangat warga Kampung Tukuq tak pernah kendur. Ketiadaan listrik PLN juga tak membuat mereka menyerah.

"SEMANGAT WARGA KAMPUNG TUKUQ INI HARUS KITA TIRU. ALHAMDULILLAH, KERJA KERAS DAN SEMANGAT MEREKA TERBAYAR DENGAN PRESTASI MEMBANGGAKAN INI," TEGAS NORBAITI

Selain Kampung Tukuq, prestasi lain juga diraih Kota Balikpapan dengan Pakarti Madya I sebagai Pelaksana Terbaik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test dan Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang yang meraih Pakarti Madya I sebagai Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan Cinta Kasih

Penyerahan penghargaan juga dihadiri Ketua TP PKK Kutai Barat Yayuk Seri Rahayu Yapan dan Ketua TP PKK Balikpapan Hj Arita Rizal Efendi. Hadir pula Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. (DPMPD Kaltim/*/abdi/arf)

PELAMAR REKRUTMEN TPP DIPERKIRAN TERUS BERTAMBAH

SAMARINDA – Pelamar rekrutmen pengisian kekosongan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Kaltim diperkirakan akan terus bertambah hingga batas akhir pendaftaran pada 10 Agustus 2019. Lonjakan jumlah pelamar disebut akan bertambah seiring diserahkannya berkas lamaran yang dihimpun dari kabupaten se Kaltim dan pelamar yang langsung melamar melalui DPMPD Kaltim.

“Hingga kemarin tercatat sudah 387 lamaran yang masuk ke kita. Sebanyak 340 lamaran dikirim melalui email dan 47 lamaran diantar langsung ke Kantor DPMPD Kaltim,” kata Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) DPMPD Kaltim, Noor Agustina, Jumat (9/8).

Jumlah tersebut dipastikan akan melonjak karena pada Jumat ini kabupaten se Kaltim menyerahkan berkas lamaran yang dihimpun di daerah. Sebab panitia memberi kemudahan dalam mekanisme penyerahan berkas lamaran melalui DPMD/DMPK kabupaten yang kemudian dihimpun untuk diserahkan ke DPMPD provinsi.

Pendaftaran melalui DPMD/DMPK dijadwalkan ditutup pada 9 Agustus 2019 untuk memudahkan rekapitulasi jumlah pelamar yang memenuhi syarat.



Paniitia, sebut Ina dalam proses penginputan langsung melakukan verifikasi berkas memastikan lolos melaju ketahapan berikutnya atau gugur. “Sesuai jadwal hasil seleksi administrasi akan kita umumkan pada 16 Agustus 2019 melalui website DPMPD Kaltim (dpmpd.kaltimprov.go.id),” katanya.

Selanjutnya mereka akan mengikuti tahapan tes tertulis, tes komputer, dan wawancara yang akan dipusatkan di dua titik, yakni Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat.

Untuk pelamar dari Kukar, Kutim, PPU, Paser, dan Berau akan dilaksanakan tes di Kota Samarinda sedangkan khusus bagi pelamar wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu akan dilaksanakan tes di Kabupaten Kutai Barat.

“Jadwal pelaksanaannya akan kita sampaikan kemudian bersamaan pengumuman nama-nama pelamar yang lolos seleksi administrasi,” sebutnya.

Seperti diketahui, pendaftaran mulai dibuka 3 - 10 Agustus 2019 dengan menyampaikan penawaran secara langsung ke Kantor DPMPD Kaltim, Jl MT Haryono No 96, Samarinda maupun melalui email (rekrutmenp3md@yahoo.com).

Ada sebanyak 80 jabatan yang akan diisi. Rinciannya tujuh jabatan diisi melalui mekanisme promosi, yakni untuk empat Tenaga Ahli dan tiga Pendamping Desa Pemberdayaan, serta 73 jabatan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka.

Rincian 73 jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka mulai dari sembilan Pendamping Desa Pemberdayaan, 29 Pendamping Teknik Infrastruktur, dan 35 Pendamping Lokal Desa. (DPMPD Kaltim/arf)

PPU JAWARA LOMBA CERDAS CERMAT DESA KALTIM

SAMARINDA -- Regu perwakilan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) keluar menjadi jawara Perlombaan Cerdas Cermat Desa Tingkat Provinsi Kaltim 2019. Mereka mampu mengungguli Regu Paser dan Kutai Timur yang hanya mengantongi masing-masing 300 dan 100 poin pada babak final lomba.

"Selamat bagi PPU berhasil menjadi juara Lomba Cerdas Cermat Desa yang pertama kali diselenggarakan tingkat Provinsi Kaltim ini. Semoga pada perhelatan PINDesKel mendatang Lomba Cerdas Cermat Nasional dilombakan. Kita akan kirim jura tingkat Kaltim berlaga di Nasional," ucap Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim, Noor Fathoni saat menyerahkan hadiah pemenang secara simbolis kepada pemenang, di Ruang Lt 6 Bankaltimtara, Rabu (27/3).

Juara diganjar hadiah berupa uang pembinaan senilai Rp5 juta dari panitia dan Rp5 juta dari Bankaltimtara Syariah untuk Juara I, Rp4 juta dari panitia dan Rp4 juta dari Bankaltimtara Syariah untuk Juara II, dan Rp3 juta dari panitia dan Rp3 juta dari Bankaltimtara Syariah untuk Juara III.

Juara I diserahkan Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Noor Fathoni, Juara II diserahkan Kabid Pembinaan Kelembagaan dan Sosbudmasy, Surya Dharma Herman, dan Juara Ketiga diserahkan Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna, Rusniati.

Tidak hanya itu. Mereka juga akan diberikan piagam penghargaan yang akan diserahkan pada Malam Anugrah Kaltim Award dalam rangka HUT Pemprov Kaltim pad 9 Januari 2020.

Terkait kemenangan Regu PPU, Fathoni menyebut mereka memang terbilang mendominasi sejak babak penyisihan. Buktinya pada babak penyisihan mereka mampu mengumpulkan 900 poin jauh mengungguli enam regu peserta lainnya.

Pada kesempatan itu, dia menyebut bahwa kalah menang bukan menjadi tujuan. Terpenting daerah sudah menunjukkan komitmennya serius mengikuti lomba

Dia berharap setelah ini pengetahuan dan pengalaman yang didapat diaplikasikan dalam menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa di daerah masing-masing. "Tujuannya memang untuk itu. Mensosialisasikan UU Desa beserta turunannya agar pengetahuan dan pemahamannya semakin baik menunjang tugas sehari-hari," tukasnya. (DPMPD Kaltim/arf)



YUSUF APRESIASI KALTIM PROVINSI PERTAMA LAKSANAKAN FGD JAGA DESA, JAGA KALTIM, JAGA INDONESIA

SAMARINDA -- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Badan Diklat Kejaksaan RI, Yusuf mengapresiasi terobosan Kaltim menjadi provinsi pertama melaksanakan Focus Group Discussion Jaga Desa, Jaga Kaltim, Jaga Indonesia.

Dia menilai ini bentuk komitmen Kaltim mengawal pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa secara baik, efektif dan efisien, serta bebas dari penyalahgunaan.

"Secara nasional Program Jaga Desa sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan pemda lokus pelaksanaan kegiatan. Kalau ini inisiatif daerah melaksanakan kegiatan secara mandiri," aku Yusuf saat menjadi Nara Sumber Focus Group Discussion Jaga Desa, Jaga Kaltim, Jaga Indonesia, di Harris Hotel Samarinda, Selasa (19/11) siang.

Dia berharap menjadi contoh daerah lain menyelenggarakan kegiatan serupa. Harapannya dapat meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan. Ada pemahaman bersama dengan Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak sesuai ketentuan.

Bersinergi menjaga negeri. Mengawal mengamankan dan memberdayakan Dana Desa untuk mencapai Nawa Cita ketiga "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah dan Desa Dalam Kerangka NKRI".

Sebagai contoh dalam melaksanakan pembangunan desa menggunakan Dana Desa. Aparat Penegak Hukum harus tahu ada mekanisme berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan menggunakan anggaran pemerintah lainnya.

Pendekatannya padat karya. Desa diwajibkan memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, termasuk dalam memenuhi ketersediaan bahan material diutamakan dari desa setempat sekalipun harganya lebih mahal ketimbang dari luar.

"Pemahamannya harus sama. Kalau tidak, bisa jadi masalah," katanya sambil menyebut pelaksanaan Dana Desa ada Kepresnya yang intinya mendorong Aparat Penegak Hukum dengan pendekatan pencegahan.

Sejalan dengan itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Badan Diklat Kejaksaan RI berencana menggelar pendidikan dan latihan terpadu di Badan Diklat.

Kegiatan melibatkan Aparat Penegak Hukum, Pengawas Internal Pemerintah, Pengelola Kegiatan, dan pengelola keuangan agar ada pemahaman sama dalam penegakan hukum preventif dalam rangka Menuju Indonesia Maju.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi sebelumnya mengaku sengaja mengagendakan Program Jaga Desa tingkat Kaltim.

Program tindak lanjut kerja sama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tersebut diharap meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa.

YUSUF APRESIASI KALTIM PROVINSI PERTAMA LAKSANAKAN FGD JAGA DESA, JAGA KALTIM, JAGA INDONESIA (1)



Pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Kaltim terkait persiapan pelaksanaannya.

Kegiatan menggunakan dana yang bersumber dari sisa Dana Dekonsentrasi P3MD Kaltim, terdapat Rp700 juta sisa gaji Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang tidak terisi atau terjadi kekosongan.

"Dana itu direvisi peruntukannya untuk pelaksanaan Program Jaga Desa. Target kita menghadirkan Direktur B Jaksa Agung Muda Intelegen Kejaksaan RI, Yusuf yang saat ini menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Badan Diklat Kejaksaan RI sebagai narasumber kegiatan," sebutnya.

Konsepnya hampir mirip dengan pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa, di Swissbel Hotel Balikpapan, Selasa 8 Oktober 2019 lalu.(DPMPD Kaltim/arf)